

RENCANA AKSI BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH POROV. SULTENG TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Indeks Pelayan Publik				3,20	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi				38	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsu, Tepat Ukuran	Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dimensi Struktur				78	Tersusnya Dokumen evaluasi hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi				1
																			Tertaksannya Evaluasi Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan Provinsi				1
																			Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah				1
													Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Kab/kota	Persentase Kab/Kota yang Terevaluasi Kelembagaanya	20	30	30	20	Tersusnya Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	2	2	2	4
																			Terbitnya Dokumen Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan	20	30	30	20
																			Terevaluasinya Kelembagaan Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks Kematangan Kategori Sedang		1	1	1
													Meningkatkan Kualitas Penataan Jabatan	Persentase Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan yang mendapatkan Persetujuan MenpanRB	20	30	30	20	Tersusnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Analis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan				3
														Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang mendapatkan Persetujuan MenpanRB					Terfasilitasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural Perangkat Daerah	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang tersusun				40
																			Tervalidasinya Standar kompetensi Jabatan Struktural perangkat daerah	Jumlah Jabatan SKJ yang mndapatkan rekomendasi				1
																			Terfasilitasinya Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah yang terfasilitasi				40
																			Tervalidasinya Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan yang tervalidasi				1
													Meningkatnya Penerapan SOP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP berdasarkan Probis Pemda	20	30	30	20	Tersusnya Dokumen Hasil Pengelolaan Tatakalasana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatakalasana Pemerintahan				1
													Tersusnya Dokumen Probis Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Probis Pemerintah Daerah yang tersusun			1		Terfasilitasi Penyusunan Dokumen SOP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat yang difasilitasi dalam penyusunan SOP Berdasarkan Probis Pemerintah Daerah		40		
																			Terfasilitasinya Perangkat Daerah dalam Penyusunan Probis Pemerintah Daerah	Jumlah Prangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan Probis Pemerintah Daerah		40		
																			Terfasilitasinya Perangkat Daerah dalam Penyusunan Probis Pemerintah Daerah	Jumlah Prangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan Probis Pemerintah Daerah		40		

													88	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi standar pelayanan	20	20	20	20	Tersusnya Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik					5
															Persentase Kab/Kota yang Terbina Pelayanan Publik	20	30	30	20	Teradvokasinya Perangkat Daerah Unit Kerja Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang teradvokasi terkait penilaian PEKPP Nasional		3			
													85,05							Jumlah Perangkat Daerah yang Teradvksi terkait Penilaian Ombudsman RI		5				
																			Perangkat Daerah Provinsi mendapatkan Penilaian PEKPPPP Mandiri	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang di nilai PEKPP Mandiri					38	
																			Terbinanya Kab/kota terkait Persipan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah KAB/KOTA yang dibina Pelayanan Publiknya untuk persiapan evalusi		13				
															Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota dengan Nilai IKM Minimal Baik				80	Terpantaunya Penerapan Aplikasi SKM Online Terintegrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terpantau penerapan Aplikasi SKM Online Terintegrasi	20	30			
																				Jumlah Kab/kota yang terpantau Penerapan Aplikasi SKM Online Terintegrasi	5	8				
								Meningkatnya kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi pelaporan kinerja	Nilai Pelaporan kinerja				12,00	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LKIP Pemerintah Daerah dan LKIP Perangkat Daerah yang Memenuhi 7 Informasi	20	20	20	15	Tersusnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	2			
															Persentase Perjanjian Kinerja Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	20	30	30	20	Tersusunnya LKIP Pemerintah Daerah	Jumlah LKIP Pemerintah Daerah yang tersusun		1			
																			Terverifikasinya LKIP Perangkat Daerah	Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	25	25				
																			Tersusnya Perjanjian Kinerja PEMDA	Jumlah Perjanjian Kinerja Pemda yang tersusun		1			1	
																			Terverifikasinya Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi		25	25			
								Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi General	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Minimal "B"				40	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Rencana Aksi RB General Perangkat Daerah dengan Kategori Baik	20	30	30	20	Tersusnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					1
																			Terfasilitasinya Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen rencana aksi RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Renacana Aksi RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah		1				
																			Termonitoringnya Pelaksanaan Dokumen Rencana Aksi Reformasi RB Pemda pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB		5	5		5	

																		Tersusunnya Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah					40	
																		Terbinanya Kab/Kota dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina pelaksanaan Reformasi Birokrasinya				3		
						Meningkatnya penerapan budaya kerja pada perangkat daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah					69	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi budaya kerja berAKHLAK kategori sehat	20	30	30	20	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Buda Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1	
																		Terinternalisasinya Budaya Kerja pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Panduan Perilaku Budaya Kerja Ber-Akhlak Pemerintah Daerah			1			
																			Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Imlementasi Budaya Kerja Ber-AKHLAK		13	13		14	
																			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Budaya Kerjanya			20	20		
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi					90	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Nilai SAKIP Biro Organisasi					83,80	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar, Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar, Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	4	
													Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	20	30	30	20	Tersedianya Dokumen Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	5	3	4	
													Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dan terpenuhi	20	30	30	20	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4			2	
																		Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2				1	
																		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3	4	4	3		
													Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian	20	30	30	20	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	0				
																		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	5	5	3	
													Meningkatnya Sarana dan Prasarana Biro Organisasi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	20	30	30	20	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	0	0

												Meningkatnya Penataan Kearsipan Biro Organisasi Memenuhi Standar	Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar	20	30	30	20	Tertaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	10	15	20
												Meningkatnya Pemeliharaan Barang dan Aset Biro	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi	20	30	30	20	Tertaksannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya	5	5	5	7
																		Tertaksannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	10	10	15	20

Palu, 07 Juli 2026 KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULTENG



NENG ELLY, SH.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730601 199503 2 002